

KONSEP DASAR BIAYA DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: Landasan Teoritis dalam Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Muhammad Qadri Al-Fathsi¹, Alwan Suban²

¹ ²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹qadrialfathsi@gmail.com, ²alwansuban@-uin-alauddin.ac.id

Abstract (English)

This study aims to analyze the basic concepts of educational costs and educational financing, as well as the underlying rationale for costs in the provision of education. This study employed a library research method using a descriptive-analytical approach. Data were obtained from relevant scholarly sources, particularly journal articles and academic publications discussing educational costs, educational financing, financial management, efficiency, and effectiveness in the use of educational funds. The data were analyzed through the identification, classification, interpretation, and synthesis of concepts based on the focus of the study. The results show that educational costs refer to various resource sacrifices required for the provision of education, while educational financing has a broader scope, encompassing the planning, provision, allocation, utilization, control, and evaluation of funds. The underlying rationale for educational costs arises from limited resources amid diverse educational needs, requiring appropriate prioritization and resource allocation. The use of educational funds also needs to consider efficiency and effectiveness so that available resources can support the achievement of educational objectives. The implication of this study is that educational financing management should be positioned as part of strategic management through systematic planning, efficient and effective resource utilization, and transparent and accountable financial management.

Article History

Submitted: 29 September 2026

Accepted: 8 October 2026

Published: 9 October 2026

Key Words

Educational Cost,
Educational Financing,
Efficiency, Effectiveness,
Educational Management.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar biaya dan pembiayaan pendidikan serta dasar pemikiran biaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, terutama artikel jurnal dan publikasi akademik yang membahas biaya pendidikan, pembiayaan pendidikan, pengelolaan keuangan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan biaya pendidikan. Analisis dilakukan melalui identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis berbagai konsep berdasarkan fokus kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pendidikan merupakan berbagai pengorbanan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan pembiayaan pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi perencanaan, penyediaan, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, dan evaluasi dana. Dasar pemikiran biaya pendidikan berangkat dari keterbatasan sumber daya di tengah beragamnya kebutuhan pendidikan, sehingga diperlukan penetapan prioritas dan alokasi sumber daya secara tepat. Penggunaan biaya juga perlu memperhatikan efisiensi dan efektivitas agar sumber daya yang tersedia dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Implikasi kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu ditempatkan sebagai bagian dari manajemen strategis melalui perencanaan yang sistematis, penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Sejarah Artikel

Submitted: 29 September 2026

Accepted: 8 October 2026

Published: 9 October 2026

Kata Kunci

Biaya Pendidikan,
Pembiayaan Pendidikan,
Efisiensi, Efektivitas,
Manajemen Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan sumber daya manusia sehingga penyelenggaraannya membutuhkan dukungan berbagai sumber daya secara berkelanjutan. Proses pendidikan tidak hanya berlangsung melalui kegiatan pembelajaran, tetapi juga mencakup penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, bahan pembelajaran, layanan administrasi, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya. Seluruh kebutuhan tersebut memiliki konsekuensi ekonomi yang harus direncanakan dan dikelola secara tepat. Dengan demikian, biaya dan pembiayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan karena keberlangsungannya turut bergantung pada kemampuan lembaga dalam menyediakan dan mengelola sumber daya keuangan secara efektif (Muspawi & Lukita, 2023; Suryaman & Trisnawati, 2025).

Dalam kajian pendidikan, istilah biaya dan pembiayaan sering digunakan secara berdekatan, meskipun keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Biaya pendidikan berkaitan dengan pengorbanan ekonomi atau kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, sedangkan pembiayaan pendidikan lebih menunjuk pada proses perencanaan, pengadaan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana. Perbedaan tersebut penting karena biaya memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya pendidikan, sementara pembiayaan menjelaskan bagaimana kebutuhan tersebut dikelola melalui mekanisme keuangan yang terencana (Kamaruddin et al., 2026). Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep biaya menjadi dasar bagi penyusunan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan telah banyak dibahas dari perspektif pengelolaan dan tata kelola keuangan. Muspawi dan Lukita (2023), misalnya, menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan di sekolah berkaitan dengan efektivitas penggunaan sumber dana, transparansi, akuntabilitas, serta dukungannya terhadap proses pembelajaran. Suryaman dan Trisnawati (2025) menekankan pentingnya perencanaan anggaran, pemanfaatan teknologi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengawasan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Sementara itu, Rohaniyah dan Mardiyah (2025) menyoroti pentingnya penyelarasan antara rencana biaya dan sumber pendanaan agar penggunaan anggaran lebih efisien, transparan, dan mendukung keberlanjutan program pendidikan. Kajian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi mencakup perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, efektivitas penggunaan dana, transparansi informasi, dan akuntabilitas pengelolaannya.

Meskipun demikian, kecenderungan kajian tersebut lebih banyak menempatkan pembiayaan pendidikan pada aspek pengelolaan, strategi, tata kelola, dan permasalahan implementatif. Pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan hakikat biaya, konsep pembiayaan, serta dasar pemikiran biaya sebagai satu landasan teoritis masih perlu diperdalam. Kesenjangan ini penting karena pengelolaan pembiayaan yang efektif pada dasarnya tidak hanya bergantung pada kemampuan mengelola dana, tetapi juga pada ketepatan dalam memahami kebutuhan biaya yang menjadi dasar perencanaan dan pengalokasian sumber daya. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan nilai kebaruan berupa sintesis konseptual yang menempatkan konsep biaya dan pembiayaan pendidikan dalam satu kerangka teoritis, sekaligus menjelaskan dasar pemikiran yang melandasi munculnya biaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar biaya dan pembiayaan pendidikan serta mengkaji dasar pemikiran biaya dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai landasan teoritis dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kajian ini

diharapkan dapat memperjelas hubungan konseptual antara biaya sebagai kebutuhan sumber daya dan pembiayaan sebagai proses pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga dapat menjadi dasar teoritis bagi perencanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep dasar biaya dan pembiayaan pendidikan serta dasar pemikiran biaya dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas biaya pendidikan, pembiayaan pendidikan, pengelolaan keuangan pendidikan, efisiensi, efektivitas, serta prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dengan fokus kajian. Sumber yang digunakan diprioritaskan pada publikasi ilmiah yang relevan dan mutakhir, terutama penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, dengan tetap menggunakan sumber teoritis yang lebih lama apabila diperlukan untuk menjelaskan konsep dasar. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan dua fokus pembahasan, yaitu (1) konsep dasar biaya dan pembiayaan pendidikan dan (2) dasar pemikiran biaya dalam pendidikan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi informasi yang relevan, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi konsep, dan sintesis berbagai pandangan dari sumber yang dikaji. Analisis diarahkan untuk menemukan keterkaitan antara biaya sebagai konsekuensi kebutuhan sumber daya pendidikan dan pembiayaan sebagai proses penyediaan serta pengelolaan sumber daya tersebut. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis untuk membangun pemahaman teoritis mengenai kedudukan biaya dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Biaya dan Pembiayaan Pendidikan

Pengertian dan Hakikat Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan pada dasarnya merupakan seluruh pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan proses pendidikan. Pengorbanan tersebut tidak terbatas pada pengeluaran dalam bentuk uang, tetapi dapat mencakup barang, tenaga, maupun sumber daya lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks lembaga pendidikan, biaya muncul karena setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan membutuhkan sumber daya yang harus disediakan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nurkamiden & Anwar, 2023). Pandangan tersebut sejalan dengan Kamaruddin et al. (2026) yang memaknai biaya pendidikan sebagai kebutuhan dana yang diperlukan untuk menjalankan pendidikan, sehingga pembahasannya berkaitan dengan besaran dana yang dibutuhkan serta komponen kebutuhan yang harus dipenuhi.

Menurut Apriyani et al. (2022), biaya pendidikan mencakup berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, termasuk kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, proses pembelajaran, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, biaya pendidikan memiliki cakupan yang luas karena melekat pada berbagai aktivitas yang memungkinkan proses pendidikan berlangsung secara teratur.

Biaya pendidikan dapat dipahami sebagai nilai ekonomi dari seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan menunjang proses pendidikan, baik yang berbentuk

pengeluaran langsung maupun sumber daya lain yang memiliki konsekuensi ekonomi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah uang yang dibelanjakan, tetapi juga dengan kebutuhan sumber daya yang harus dipenuhi agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Hakikat biaya pendidikan berkaitan dengan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses pendidikan. Biaya tidak hanya dipahami sebagai sejumlah uang yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, tetapi juga mencerminkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, administrasi, maupun kebutuhan penunjang lainnya. Dalam perspektif manajemen pendidikan, keberadaan biaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian tujuan lembaga karena setiap program membutuhkan sumber daya yang harus direncanakan dan dialokasikan secara tepat (Muspawi & Lukita, 2023; Suryaman & Trisnawati, 2025).

Biaya pendidikan juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas karena tidak seluruh biaya berbentuk pengeluaran moneter. Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan serta biaya tidak langsung yang dapat berupa biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan menunjukkan manfaat atau potensi pendapatan yang dikorbankan ketika seseorang memilih mengikuti pendidikan dibandingkan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, hakikat biaya pendidikan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Wida et al., 2024).

Dari sisi klasifikasi, biaya pendidikan dapat dilihat berdasarkan beberapa pendekatan. Berdasarkan penggunaannya dalam penyelenggaraan pendidikan, biaya terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan sumber daya yang manfaatnya digunakan dalam jangka panjang, sedangkan biaya operasional digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan secara rutin. Adapun biaya personal merupakan pengeluaran yang perlu ditanggung peserta didik atau keluarganya agar dapat mengikuti proses pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Klasifikasi tersebut juga sejalan dengan pembahasan mengenai standar pembiayaan pendidikan yang menempatkan biaya investasi, operasi, dan personal sebagai komponen utama pembiayaan pendidikan (Kamaruddin et al., 2026; Maharani et al., 2024).

Selain itu, biaya pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan pengeluaran dengan proses pendidikan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung mencakup pengeluaran yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti gaji guru, fasilitas pembelajaran, dan kebutuhan kegiatan belajar. Sementara itu, biaya tidak langsung mencakup pengeluaran atau konsekuensi ekonomi yang tidak secara langsung terlihat dalam kegiatan pembelajaran, termasuk biaya kesempatan. Pendekatan lain juga membedakan biaya menjadi biaya rutin dan biaya pembangunan, biaya pribadi dan biaya masyarakat, serta *monetary cost* dan *non-monetary cost*. Keragaman klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa biaya pendidikan memiliki struktur yang kompleks dan perlu dipahami berdasarkan tujuan analisisnya (Maharani et al., 2024).

Pemahaman terhadap klasifikasi biaya tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perencanaan pembiayaan pendidikan. Rohaniyah dan Mardiyah (2025) menunjukkan bahwa perencanaan biaya perlu diselaraskan dengan sumber pendanaan yang tersedia agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efektif, mencegah ketidakseimbangan anggaran, dan mendukung keberlanjutan program pendidikan. Dengan demikian, identifikasi jenis dan struktur biaya bukan hanya berfungsi untuk mengetahui besarnya kebutuhan pendidikan, tetapi

juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan menyusun pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan lembaga (Rohaniyah & Mardiyah, 2025).

Konsep dan Ruang Lingkup Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan karena setiap program dan kegiatan membutuhkan dukungan sumber daya keuangan. Pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sejumlah dana, tetapi juga menyangkut proses bagaimana dana tersebut direncanakan, diperoleh, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengeluaran, karena di dalamnya terdapat proses pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Kamaruddin et al., 2026; Nover et al., 2025).

Konsep pembiayaan pendidikan dapat dipahami melalui hubungan antara kebutuhan biaya dan pengelolaan sumber dana. Biaya menunjukkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, sedangkan pembiayaan berkaitan dengan bagaimana kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pengelolaan sumber dana yang tersedia. Purwi dan Hanif (2024) menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berfokus pada tiga hal utama, yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi. Optimalisasi berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia, alokasi berkaitan dengan penentuan penggunaan dana berdasarkan program prioritas, sedangkan distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak berhenti pada penyediaan dana, tetapi berlanjut pada keputusan mengenai ke mana dan untuk kebutuhan apa dana tersebut digunakan.

Ruang lingkup pembiayaan pendidikan mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan lembaga. Wida et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan mencakup penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan, sedangkan kegiatan manajemen pembiayaan meliputi penyusunan anggaran, pembiayaan, dan pemeriksaan. Dalam praktiknya, anggaran pendidikan memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Anggaran penerimaan menunjukkan sumber pendapatan yang diperoleh lembaga, sedangkan anggaran pengeluaran menunjukkan dana yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan perlu memperhatikan keseimbangan antara sumber dana yang tersedia dengan kebutuhan pengeluaran lembaga (Wida et al., 2024).

Ruang lingkup tersebut juga dapat dilihat dari tahapan pengelolaannya. Ansori et al. (2026) membagi manajemen pembiayaan pendidikan ke dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan berorientasi pada penetapan kebutuhan dan prioritas serta penyusunan anggaran. Pelaksanaan berkaitan dengan realisasi penggunaan dana sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan. Ketiga tahapan tersebut membentuk suatu proses yang berkesinambungan sehingga pengelolaan pembiayaan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan.

Pada tahap perencanaan, kebutuhan pendidikan perlu diidentifikasi sebelum anggaran ditetapkan. Hal ini penting karena penggunaan dana harus disesuaikan dengan prioritas program dan kemampuan sumber pendanaan yang tersedia. Rohaniyah dan Mardiyah (2025) menunjukkan bahwa penyelarasan antara rencana biaya dan sumber pendanaan dapat meningkatkan efisiensi keuangan serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara kebutuhan

dan kemampuan pendanaan. Dalam pendidikan Islam, sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, serta sumber lain seperti zakat, infak, dan wakaf. Oleh karena itu, perencanaan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, tetapi juga mempertimbangkan sumber dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Rohaniyah & Mardiyah, 2025).

Selain perencanaan dan pengalokasian, ruang lingkup pembiayaan mencakup penggunaan serta pengawasan dana. Dalam konteks pendidikan dasar, pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan seperti RKJM dan RKAS, pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan seperti ARKAS, serta keterlibatan kepala sekolah, guru, dan komite dalam proses pengelolaan pembiayaan (Suryaman & Trisnawati, 2025). Penggunaan dana selanjutnya perlu disertai pencatatan dan pengawasan agar realisasi pembiayaan dapat dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Muspawi dan Lukita (2023) menunjukkan bahwa kerja sama antara kepala sekolah dan bendahara, disertai sistem pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi keuangan, mendukung penggunaan dana untuk pelaksanaan program pendidikan dan pemenuhan sarana pembelajaran.

Dengan demikian, konsep dan ruang lingkup pembiayaan pendidikan dapat dirumuskan sebagai serangkaian proses pengelolaan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, optimalisasi sumber dana, alokasi dan distribusi, pelaksanaan penggunaan dana, hingga pemeriksaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Pembiayaan pendidikan dengan demikian memiliki hubungan yang erat antara sumber dana, kebutuhan pendidikan, keputusan alokasi, dan pencapaian tujuan lembaga. Pengelolaan yang baik bukan hanya ditentukan oleh jumlah dana yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengarahkan dana tersebut kepada kebutuhan dan program yang menjadi prioritas.

Prinsip dan Pengelolaan Biaya Pendidikan

Pengelolaan biaya pendidikan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada tersedianya dana, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut digunakan secara tepat untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, sedangkan pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan biaya pendidikan memiliki dimensi manajerial sekaligus tanggung jawab publik dalam memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan pendidikan.

Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi dasar penting dalam penggunaan biaya pendidikan. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan lembaga menggunakan sumber daya keuangan secara hemat dan tepat tanpa mengurangi mutu layanan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan dan program pendidikan yang hendak dicapai. Kamaruddin et al. (2026) menempatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sejalan dengan itu, Nover et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan perlu dilakukan secara terencana agar sumber daya keuangan dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, tenaga pendidik, dan pengembangan program pendidikan.

Efisiensi dan efektivitas tersebut perlu diwujudkan melalui perencanaan biaya yang berbasis kebutuhan dan prioritas. Purwi dan Hanif (2024) menjelaskan bahwa manajemen

pembiayaan pendidikan mencakup tiga hal utama, yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi. Optimalisasi berkaitan dengan kemampuan lembaga memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia, sedangkan alokasi dan distribusi berkaitan dengan penentuan serta penyaluran dana berdasarkan program yang menjadi prioritas. Dalam konteks pendidikan Islam, Rohaniyah dan Mardiyah (2025) juga menunjukkan bahwa penyelarasan antara rencana biaya dan sumber pendanaan dapat meningkatkan efisiensi keuangan, mencegah defisit anggaran, serta mendukung keberlanjutan program pendidikan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan dana pendidikan. Transparansi menghendaki adanya informasi yang terbuka mengenai sumber, jumlah, dan penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian Muspawi dan Lukita (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi keuangan dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan serta pemenuhan sarana pembelajaran. Hal tersebut diperkuat oleh kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dapat memperkuat pengawasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Pengelolaan biaya pendidikan selanjutnya dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Ansori et al. (2026) menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya keuangan dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi. Nover et al. (2025) juga menempatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai bagian dari praktik manajemen pembiayaan. Dengan demikian, pengelolaan biaya tidak berhenti pada penyusunan anggaran, tetapi mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran serta penilaian terhadap hasil penggunaannya.

Pada tingkat satuan pendidikan, pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta pelibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Suryaman dan Trisnawati (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat diperkuat melalui penyusunan RKJM dan RKAS, pemanfaatan teknologi seperti ARKAS, serta keterlibatan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah. Keterlibatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Dengan demikian, prinsip dan pengelolaan biaya pendidikan dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang menghubungkan perencanaan kebutuhan, penetapan prioritas, penggunaan sumber dana, pengawasan, dan evaluasi dengan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan. Pengelolaan yang demikian menempatkan biaya pendidikan bukan sekadar sebagai pengeluaran lembaga, tetapi sebagai sumber daya yang harus diarahkan secara tepat untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian mutu pendidikan. Dalam konteks ini, pengelolaan pembiayaan yang strategis dan partisipatif dapat memperkuat penggunaan dana sekaligus mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

Dasar Pemikiran Biaya dalam Pendidikan

Keterbatasan Sumber Daya dan Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang membutuhkan berbagai sumber daya untuk dapat diselenggarakan secara optimal. Sumber daya tersebut mencakup tenaga pendidik dan

kependidikan, sarana dan prasarana, bahan pembelajaran, teknologi, administrasi, pemeliharaan fasilitas, serta berbagai kebutuhan peserta didik. Pada saat yang sama, sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran munculnya biaya dalam pendidikan. Purwi dan Hanif (2024) menjelaskan bahwa persoalan mendasar dalam konsep ekonomi pendidikan berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk mencapai tujuan yang beragam. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan menuntut adanya pertimbangan dalam menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi dan sumber daya yang perlu dialokasikan.

Keterbatasan sumber daya menjadi semakin penting karena kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, tetapi juga mencakup kebutuhan investasi dan pengembangan. Biaya investasi dapat digunakan untuk pengadaan aset jangka panjang seperti tanah, gedung, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan pengembangan sistem. Sementara itu, biaya operasional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, listrik, air, internet, bahan ajar, dan pemeliharaan. Di sisi lain, terdapat biaya personal yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik, seperti transportasi, seragam, alat tulis, konsumsi, dan kebutuhan belajar lainnya (Kamaruddin et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan bersifat luas dan berlangsung secara berkelanjutan, sehingga penyediaan biaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan.

Keterbatasan sumber daya juga menyebabkan setiap lembaga pendidikan perlu menentukan prioritas kebutuhan. Tidak seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu yang sama dengan tingkat pembiayaan yang tersedia. Karena itu, sumber dana perlu dialokasikan pada program dan kebutuhan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pendidikan. Purwi dan Hanif (2024) menempatkan optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi sebagai bagian penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Alokasi merupakan proses penentuan penggunaan dana berdasarkan program yang diprioritaskan, sedangkan distribusi berkaitan dengan penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya bukan hanya persoalan jumlah dana, tetapi juga menyangkut ketepatan dalam menentukan penggunaannya.

Selain keterbatasan dana yang bersifat langsung, biaya pendidikan juga dapat mencerminkan sumber daya yang dikorbankan secara tidak langsung. Biaya pendidikan dapat berupa biaya langsung yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan maupun biaya tidak langsung yang tidak selalu terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu bentuk biaya tidak langsung adalah *opportunity cost*, yaitu nilai kesempatan yang dikorbankan ketika seseorang memilih mengikuti pendidikan dibandingkan menggunakan waktu tersebut untuk kegiatan lain, seperti bekerja (Kamaruddin et al., 2026). Konsep tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga waktu, tenaga, kesempatan, dan sumber daya lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Persoalan keterbatasan sumber daya selanjutnya berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam menyesuaikan kebutuhan dengan sumber pendanaan yang tersedia. Rohaniyah dan Mardiyah (2025) menjelaskan bahwa perencanaan strategis dalam pendidikan mencakup perencanaan biaya, alokasi sumber daya, dan penyelarasan anggaran dengan berbagai sumber pendanaan. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan yang telah direncanakan, lembaga perlu menyesuaikan kembali pengeluaran atau mencari sumber pendanaan tambahan. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya menjadi dasar bagi lembaga pendidikan untuk melakukan perencanaan kebutuhan, menetapkan prioritas, dan menyesuaikan penggunaan dana dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut, keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pendidikan memiliki hubungan yang erat dalam membentuk dasar pemikiran biaya pendidikan. Semakin beragam kebutuhan yang harus dipenuhi, semakin penting proses penentuan prioritas dan alokasi sumber daya dilakukan secara tepat. Biaya pendidikan dalam konteks ini bukan sekadar jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi merupakan konsekuensi dari penggunaan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keterbatasan sumber daya menjadi landasan penting sebelum membahas biaya sebagai konsekuensi penyelenggaraan pendidikan.

Biaya Sebagai Konsekuensi Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penggunaan berbagai sumber daya. Setiap kegiatan pendidikan membutuhkan tenaga manusia, fasilitas, bahan pembelajaran, teknologi, administrasi, serta sumber daya lainnya agar proses pembelajaran dapat berlangsung dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Dengan demikian, biaya muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan sumber daya tersebut. Hidayatulloh dan Nugraha (2024) menjelaskan bahwa produksi biaya pendidikan berkaitan dengan hubungan antara berbagai input, seperti tenaga kerja, fasilitas, dan sumber daya lainnya, dengan layanan pendidikan sebagai output yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan bukan sekadar pengeluaran administratif, tetapi merupakan bagian yang melekat pada proses penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, biaya mencakup berbagai pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk menyediakan layanan pendidikan. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang, barang, tenaga, maupun kesempatan yang memiliki nilai ekonomi. Kamaruddin et al. (2026) menjelaskan bahwa biaya pendidikan muncul karena adanya kebutuhan untuk menyediakan guru, sarana dan prasarana, media pembelajaran, layanan administrasi, pemeliharaan lingkungan belajar, serta kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, selama lembaga pendidikan menjalankan kegiatan pembelajaran dan layanan pendukungnya, penggunaan sumber daya akan selalu menimbulkan biaya.

Konsekuensi biaya tersebut dapat dilihat melalui berbagai komponen pengeluaran pendidikan. Wida et al. (2024) membedakan biaya pendidikan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran, seperti alat pembelajaran, sarana belajar, transportasi, dan gaji guru, sedangkan biaya tidak langsung berkaitan dengan kesempatan yang dikorbankan peserta didik selama mengikuti pendidikan (*opportunity cost*). Selain itu, anggaran pendidikan juga mencakup penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, konsekuensi biaya pendidikan tidak hanya terlihat dari pengeluaran yang tercatat dalam anggaran, tetapi juga dari sumber daya dan kesempatan yang digunakan untuk mengikuti atau menyelenggarakan pendidikan.

Besarnya biaya juga dipengaruhi oleh karakteristik dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Hidayatulloh dan Nugraha (2024) mengidentifikasi infrastruktur, tenaga pendidik, teknologi, kebijakan pendidikan, dan aksesibilitas sebagai faktor yang dapat memengaruhi biaya pendidikan. Perkembangan teknologi, misalnya, dapat menimbulkan kebutuhan terhadap perangkat elektronik, jaringan internet, dan platform pembelajaran, sementara perubahan kebutuhan tenaga pendidik dan fasilitas dapat memengaruhi biaya operasional lembaga. Oleh karena itu, biaya pendidikan bersifat dinamis dan dapat berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan, kebijakan, teknologi, serta kondisi penyelenggaraan pendidikan.

Konsekuensi biaya tersebut selanjutnya menuntut lembaga pendidikan untuk menggunakan sumber daya secara tepat. Purwi dan Hanif (2024) menjelaskan bahwa

manajemen pembiayaan berfungsi mengoptimalkan sumber dana, mengalokasikan dana berdasarkan program prioritas, dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Nover et al. (2025) juga menunjukkan bahwa perencanaan pembiayaan diperlukan agar sumber daya keuangan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum. Sementara itu, Rohaniyah dan Mardiyah (2025) menekankan pentingnya penyelarasan antara rencana biaya dan sumber pendanaan agar kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kemampuan keuangan lembaga.

Dengan demikian, biaya merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan karena setiap proses pendidikan memerlukan penggunaan sumber daya. Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya biaya, melainkan pada bagaimana biaya tersebut direncanakan, dialokasikan, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan pendidikan. Pemahaman ini menjadi dasar untuk melihat bahwa biaya pendidikan memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan layanan pendidikan, sehingga penggunaan biaya perlu diarahkan pada pencapaian hasil pendidikan secara efektif dan efisien.

Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan

Penggunaan biaya pendidikan perlu diarahkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana sumber daya digunakan secara hemat dan tepat untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan biaya pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana yang dibelanjakan, tetapi juga dari hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Hisyam dan Siradjuddin (2025) menjelaskan bahwa efisiensi dapat dilihat melalui hubungan antara input dan output, termasuk kemampuan menghasilkan keluaran tertentu dengan penggunaan input yang optimal. Sejalan dengan itu, Kamaruddin et al. (2026) menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, yaitu dana harus digunakan untuk mendukung tujuan pendidikan secara tepat sasaran tanpa pemborosan.

Efisiensi penggunaan biaya pendidikan terutama berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana. Keterbatasan sumber daya menyebabkan lembaga pendidikan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara bersamaan, sehingga dana perlu diarahkan pada program yang memiliki tingkat prioritas dan keterkaitan dengan tujuan pendidikan. Purwi dan Hanif (2024) menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan mencakup optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi. Alokasi dana perlu memperhatikan program prioritas, sedangkan distribusi dilakukan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efisiensi tidak berarti sekadar mengurangi jumlah pengeluaran, tetapi memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki alasan, sasaran, dan manfaat yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan.

Efisiensi penggunaan biaya juga dapat dianalisis berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan layanan atau hasil pendidikan yang diperoleh. Nizhamiyah (2024) menjelaskan bahwa analisis efisiensi keuangan sekolah dapat dilakukan melalui biaya satuan (*unit cost*), yaitu rata-rata biaya per peserta didik yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dalam periode tertentu dibagi jumlah peserta didik. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi biaya perlu dilihat secara proporsional, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan dan hasil atau layanan yang dihasilkan, bukan hanya melihat nominal pengeluaran secara terpisah.

Selain efisien, penggunaan biaya pendidikan harus efektif, yaitu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan program pendidikan. Hisyam dan Siradjuddin (2025) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam analisis efektivitas pembiayaan pendidikan, input dapat berupa program prioritas, kegiatan, tujuan, alokasi biaya, dan target, sedangkan output berupa hasil atau realisasi kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dana yang telah terserap seluruhnya belum dapat langsung dikatakan efektif apabila program yang dibiayai belum mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebaliknya, penggunaan dana perlu dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang dihasilkan bagi proses pendidikan.

Hubungan antara penggunaan biaya dan hasil pendidikan juga terlihat pada penelitian Muspawi dan Lukita (2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan keuangan sekolah untuk kepentingan pendidikan, disertai kerja sama pengelola, akuntabilitas, dan transparansi, dapat mendukung mutu proses pembelajaran melalui terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penggunaan biaya dapat diamati dari kemampuan pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan memenuhi kebutuhan yang secara langsung menunjang proses pembelajaran. Suryaman dan Trisnawati (2025) juga menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang tepat, efisien, dan akuntabel melalui perencanaan seperti RKJM dan RKAS, pemanfaatan teknologi, serta melibatkan unsur sekolah berimplikasi pada peningkatan transparansi dan kualitas pembelajaran.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan biaya selanjutnya memerlukan kesesuaian antara perencanaan biaya dengan sumber pendanaan yang tersedia. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kemampuan pendanaan dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan anggaran. Rohaniyah dan Mardiyah (2025) menemukan bahwa penyelarasan rencana biaya dengan sumber pendanaan dapat meningkatkan efisiensi keuangan, mencegah defisit anggaran, dan meningkatkan transparansi. Optimalisasi dana juga dapat didukung melalui digitalisasi keuangan dan sistem audit yang transparan. Nover et al. (2025) menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan yang terencana memungkinkan lembaga pendidikan mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penggunaan biaya yang efisien dan efektif juga membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa realisasi pengeluaran tetap sesuai dengan rencana dan prioritas yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi digunakan untuk melihat manfaat serta ketercapaian program setelah dana digunakan. Hisyam dan Siradjuddin (2025) menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan evaluasi rutin agar penggunaan anggaran sesuai dengan program pendidikan yang telah direncanakan. Efisiensi dalam konteks ini bukan sekadar pemangkasan pengeluaran, melainkan optimalisasi alokasi agar dana dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas program dan kualitas output pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, efisiensi dan efektivitas merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam penggunaan biaya pendidikan. Efisiensi menekankan ketepatan penggunaan sumber daya, sedangkan efektivitas menekankan ketercapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, biaya pendidikan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besar kecilnya pengeluaran atau tingkat penyerapan anggaran, tetapi perlu dilihat dari ketepatan alokasi, kesesuaian dengan kebutuhan, manfaat yang dihasilkan, serta ketercapaian program pendidikan. Pengelolaan biaya yang demikian memungkinkan sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal sekaligus tetap berorientasi pada mutu layanan dan pencapaian tujuan pendidikan. Keterkaitan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan biaya pendidikan pada akhirnya bukan hanya

persoalan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya memastikan sumber daya pendidikan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa biaya dan pembiayaan pendidikan merupakan dua konsep yang saling berkaitan tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda. Biaya pendidikan merujuk pada berbagai pengorbanan ekonomi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik berupa biaya investasi, operasional, personal, langsung, maupun tidak langsung. Sementara itu, pembiayaan pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup proses perencanaan, penyediaan sumber dana, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi dana pendidikan. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan kedua konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan mengelola sumber daya pendidikan secara terarah.

Dasar pemikiran biaya dalam pendidikan berangkat dari keterbatasan sumber daya di tengah beragamnya kebutuhan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, bahan pembelajaran, teknologi, administrasi, pemeliharaan, serta berbagai kebutuhan peserta didik. Penggunaan sumber daya tersebut menimbulkan biaya sebagai konsekuensi penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu menetapkan prioritas dan melakukan alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan serta tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Selanjutnya, penggunaan biaya pendidikan perlu memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan ketepatan penggunaan sumber daya dan upaya menghindari pemborosan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketercapaian tujuan dan hasil program pendidikan. Pengelolaan biaya yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia atau tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga oleh ketepatan alokasi, kesesuaian penggunaan dengan kebutuhan, manfaat yang dihasilkan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas perlu ditempatkan secara bersama dalam setiap proses pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Implikasi dari kajian ini adalah bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu dipahami sebagai bagian dari manajemen strategis lembaga pendidikan, bukan semata-mata sebagai kegiatan administratif. Lembaga pendidikan perlu menghubungkan perencanaan biaya dengan prioritas program, kemampuan sumber pendanaan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil. Penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi dasar bagi pengelola pendidikan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mendukung keberlangsungan program dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian tersebut, pengelola lembaga pendidikan disarankan untuk melakukan perencanaan biaya secara sistematis dengan mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan skala prioritas, menyesuaikan anggaran dengan sumber pendanaan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi penggunaannya. Penggunaan biaya juga perlu diarahkan pada program yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai biaya dan pembiayaan pendidikan dapat dikembangkan melalui penelitian empiris pada berbagai jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efisiensi dan efektivitas pembiayaan berdasarkan

data biaya satuan, capaian program, kualitas layanan, atau hasil belajar sehingga hubungan antara penggunaan sumber daya dan output pendidikan dapat dianalisis secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Saifillah AF, M. S., Tarmizi, M., Irpan, & Amilatika. (2026). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: RUANG LINGKUP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *Baricational-Batanghari Educational Journal*, 1(1), 60–69.
<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/baricational/article/download/456/329>
- Apriyani, A., Safidah, N., Awilismi, S., & Murtafiah, N. H. (2022). Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Unisan Jurnal*, 1(3), 277–287. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/674>
- Hidayatulloh, R., & Safwandy Nugraha, M. (2024). Konsep Dampak Faktor Ekonomi Terhadap Produksi Biaya Pendidikan. *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 1–12. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/JIEM/article/view/80>
- Istiyarini, P., & Hanif, M. (2024). Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan) di SMP Negeri 2 Karanglewas. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.37985/CW37DV81>
- Kamaruddin, N., Mardiyawati, & Wayong, M. (2026). Memahami Konsep Dasar Biaya Dan Pembiayaan Pendidikan. *EKBIS: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(01), 1–6. <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/ekbis/article/view/316>
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39. <https://doi.org/10.55606/JUBPI.V2I3.3004>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99–110. <https://doi.org/10.31849/LECTURA.V14I1.12237>
- Nover, F., Anwar US, K., & Shalahudin. (2025). Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56–64. <https://doi.org/10.54297/SEDUI.V5I1.842>
- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53–64. <https://doi.org/10.30603/TJMPL.V11I1.3384>
- Rohaniyah, A., & Mardiyah. (2025). Penyelarasan Rencana Biaya Dengan Sumber Pendanaan Organisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 428–444. <https://doi.org/10.34125/JMP.V10I2.414>
- Suryaman, M., & Trisnawati, A. (2025). Kajian Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dasar: Strategi, Tantangan, Dan Implikasinya Terhadap Mutu Sekolah. *Jurnal Tahsinia*, 6(4), 560–573. <https://doi.org/10.57171/JT.V6I4.657>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wida, A., Purba, A., Four, N. T., Situmeang, N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2024). Problematika Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah. *Nizhamiyah*, 14(1), 64–80. <https://doi.org/10.30821/NIZ.V14I1.3239>